

MASA DEPAN PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PERTARUNGAN PEMILU 2009

Yedi purwanto

ABSTRACT

As the majority in this country, the Moslems have an important role in determining who and what party will win the upcoming general election this year and then lead this country for the next five years. Dealing with leadership, Moslems believe that Prophet Muhammad is the best leader ever in the world. However, some Moslem intellectuals argued that Prophet Muhammad was only a religious leader, instead of a political leader. This article discusses any issues on the leadership of Prophet Muhammad that is presumably related to our present national concern, the general election.

1. Pendahuluan

Dalam pepatah Latin dikatakan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox populi vox Dei*). Dengan demikian, kedaulatan rakyat tidak boleh dikompromikan dengan apa dan siapa pun, kehendak rakyat seakan-akan kehendak Tuhan. Di samping itu, ada juga pepatah yang mengatakan kekuasaan rakyat adalah hukum yang paling tinggi (*salus populi supreme lex*). Oleh karena itu, dalam demokrasi ditetapkan bahwa hukum yang paling tinggi adalah kehendak rakyat (Rais, 1998:7).

Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan yang dinilai buruk oleh sebagian filosof. Pemerintahan yang didasarkan asas demokrasi adalah pemerintahan yang pemimpinnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Akan tetapi, demokrasi seperti ini hampir sulit didapatkan; yang tampak di hadapan mata adalah segelintir orang menentukan atau mengendalikan orang

banyak.

Aristoteles (w. 347 SM) (2000) menjelaskan tiga hal, yaitu pemegang kekuasaan tertinggi, tujuan pemerintahan, dan bentuk pemerintahan. Menurutnya, jumlah pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu (1) kekuasaan tertinggi dalam menyelenggarakan negara berada di tangan satu orang; (2) kekuasaan tertinggi dalam menyelenggarakan negara berada di tangan beberapa orang; dan (3) kekuasaan tertinggi dalam menyelenggarakan negara berada di tangan banyak orang.

Tujuan pemerintahan dibedakan oleh Aristoteles menjadi dua, yaitu (1) pemerintahan yang bertujuan untuk membentuk kebaikan, kesejahteraan umum, dan pemenuhan kepentingan umum (tujuan baik); dan (2) pemerintahan yang bertujuan untuk membentuk kebaikan, kesejahteraan, dan pemenuhan kepentingan pemegang kekuasaan itu sendiri (tujuan buruk, penyimpangan).

Bila dilihat dari segi kuantitas, pemegang kekuasaan tertinggi, dan

tujuan negara Aristoteles pun mengklasifikasikan bentuk pemerintahan menjadi dua, yaitu pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang buruk. Menurut Aristoteles, bentuk-bentuk pemerintahan yang baik adalah monarki, yaitu kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara berada di tangan satu orang dengan tujuan pemerintahan untuk memenuhi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum; aristokrasi, yaitu kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara berada di tangan beberapa orang dengan tujuan pemerintahan untuk memenuhi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum; politeia (negara), yaitu kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara berada di tangan banyak orang dengan tujuan pemerintahan untuk memenuhi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum (Rapar, 1993:44-46).

Bagi Aristoteles, bentuk negara yang paling ideal adalah monarki. Selain itu, ia menjelaskan tiga bentuk pemerintahan yang buruk, yaitu tirani (sebagai kebalikan dari monarki). Tirani adalah kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara berada di tangan satu orang dengan tujuan pemerintahan untuk memenuhi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan penguasa; oligarki⁵ adalah kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara berada di tangan beberapa orang dengan tujuan pemerintahan untuk memenuhi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan penguasa; demokrasi adalah kekuasaan yang berada di tangan orang banyak yang berasal dari kalangan tertentu yang dominan, digunakan lebih banyak untuk memenuhi kepentingan,

kebaikan, dan kesejahteraan kelompok pendukungnya (Campbell, 1994:18-19).

Amin Rais, reformis muslim Indonesia, menjelaskan bahwa esensi demokrasi, yaitu kebebasan menyatakan pendapat; kebebasan beragama; kebebasan dari rasa takut; kebebasan untuk sejahtera; kebebasan rakyat dalam berpartisipasi politik untuk menentukan nasibnya sendiri; dan berjalannya keseimbangan (*check and balances*), serta tegaknya hukum (Rais, 1998: 6).

Dalam tulisan ini, akan dibahas pula mengenai partisipasi politik umat Islam Indonesia pada pemilihan presiden tahun 2009 dan hubungannya dengan masa depan partai politik Islam. Oleh karena itu, pembahasan mengenai teori partisipasi dan peranan umat Islam terhadap demokrasi perlu didahulukan pembahasannya.

2. Tinjauan Teoretis tentang Politik

Partisipasi dalam kajian ilmu sosial politik dapat dijelaskan dengan teori struktural fungsional yang diperkenalkan oleh Talcott Parson. Teori ini menjelaskan hubungan realitas tertinggi (ideal) dengan realitas fisik yang dibingkai oleh kegiatan *conditioning* dan *controlling*. Hubungan realitas tertinggi dengan realitas fisik dibentuk oleh empat media (subsistem), yaitu subsistem kebudayaan, subsistem sosial, subsistem kepribadian, dan subsistem perilaku organik. Dalam teori ini ditetapkan partisipasi politik adalah (sama dengan) tindakan sosial. Oleh karena itu, partisipasi politik dikondisikan oleh subsistem kepribadian; dan pada saat yang sama juga dikontrol oleh subsistem kebudayaan. *Middle rank theory* sub-

sistem kepribadian adalah teori psikologis; dan *Middle rank theory* sub-sistem kebudayaan adalah teori sosiologis (Ritzer, 2002).

Sodik (2003) mengutip sejumlah pendapat yang merupakan lanjutan dari teori Struktural fungsional. *Pertama*, pendekatan sosiologis keyakinan tentang determinasi sosial (eksternal) dalam penentuan preferensi (keberpilihan-pemilihan) seseorang terhadap calon pimpinan atau partai. Pola perilaku memilih seseorang dapat diramalkan sesuai dengan karakteristik sosial yang melingkupi keberadaannya. Teori ini kemudian melahirkan sejumlah tesis, yaitu pemilihan umum adalah ekspresi dari perjuangan kelas secara demokratis (dari Seymour Lipset); predisposisi sosial ekonomi dan keluarga pemilih (termasuk agama) mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih (dari Pomper); dan aspek demografis (kedaerahan) berhubungan dengan perilaku memilih (dari Sherman dan Kolker). *Kedua*, pendekatan psikologis, yaitu sikap dan perilaku politik seseorang antara lain ditentukan oleh apa yang terkandung di dalam dirinya sendiri (seperti idealisme, tingkat kecerdasan, faktor biologis, dan motivasi); ia juga dipengaruhi oleh lingkungan budaya, kehidupan beragama, politik, sosial, dan ekonomi. Secara sederhana, Riswandha (dalam Sodik, 2003) berpendapat bahwa perilaku memilih individu dapat dideteksi dengan dua konsep, yaitu perasaan penting atau tidak untuk terlibat dalam isu-isu politik yang bersifat umum (*political involvement*) dan preferensi perasaan suka atau tidak

suka dari individu terhadap suatu partai atau kelompok politik tertentu.

Deden Effendi (dosen sosiologi hukum Islam) menjelaskan pendapat Marger yang membedakan partisipasi politik menjadi dua, yaitu partisipasi politik yang institusional (*institutional forms of political participation*) dan partisipasi politik yang tidak institusional (*noninstitutional forms of political participation*). Bentuk partisipasi yang kedua dianggap sebagai partisipasi yang menunjukkan ketidakpatuhan sebagai warga negara kepada negara, konfrontasi atau bahkan tindakan yang direncanakan untuk menggulingkan sistem politik yang mapan. Milbrath mengembangkan rentang partisipasi politik yang institusional menjadi empat bentuk, yaitu kegiatan gladiator (mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik, menggalang dana-dana politik, anggota aktif sebuah partai politik, menghadiri pertemuan strategis, dan menyita waktu untuk kampanye), kegiatan transisi (menghadiri pertemuan atau pawai politik, memberikan sumbangan pada partai atau calon pemimpin, dan melakukan hubungan dengan pemimpin politik), kegiatan petaruh (mengenakan gambar partai politik, berusaha mempengaruhi orang lain dalam menentukan pilihan, mengawali sebuah diskusi politik, dan memberikan suara pada pemilihan umum), dan apatis (tidak melakukan kegiatan politik). Kelompok terakhir ini, dikenal sebagai kelompok yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum; atau menentukan memilih untuk tidak memilih pemimpin yang sedang berkompetisi (Khaeruman, 2004).

Milbrath mengatakan bahwa urutan tersebut (gladiator, transisi, petaruh, dan apatis) menunjukkan urutan dari segi jumlah (kuantitas) partisipan, yaitu jumlah gladiator paling sedikit dan jumlah apatis paling banyak. Mayoritas penduduk yang memiliki hak pilih melakukan tindakan apatis (golput) karena berbagai alasan. Pernyataan ini tentu saja tidak relevan dengan partisipasi politik di Indonesia. Dari gladiator ke transisi dan dari transisi ke petaruh sangat mungkin menunjukkan hierarkis, tetapi kelompok apatis (dalam empat kali pemilihan umum-tahun 2009) tidak menjadi kelompok mayoritas.

3. Bercermin pada Pengalaman Sejarah

Umat Islam (pada masa pemilu 2004) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu umat Islam yang menjadi aktivis partai, baik partai yang berlandaskan Islam maupun partai yang tidak berlandaskan Islam dan umat Islam yang tidak menjadi anggota atau simpatisan partai. Dalam ilmu politik, kelompok kedua sering disebut kelompok massa mengambang karena tidak mengikatkan diri dengan partai tertentu.

Secara umum, peranan politik umat Islam dalam pemilihan presiden tahap I (pada pemilu 2004) dapat dibedakan menjadi empat, pertama sebagian umat Islam bertindak sebagai gladiator. Secara umum, umat Islam yang menjadi gladiator dapat dibedakan menjadi dua: santri dan nasionalis, contohnya Salahuddin Wahid (Cawapres yang diusung Partai Golkar), Hasyim Muzadi (Cawapres yang diusung PDIP), Amin

Rais (Capres yang diusung PAN), dan Hamzah Haz (Capres yang diusung PPP) mewakili muslim-santri, Sedangkan Wiranto (capres yang diusung Partai Golkar), Megawati (Capres yang diusung PDIP), Susilo Bambang Yudoyono dan Yusuf Kala (Capres dan Cawapres yang diusung oleh Partai Demokrat), Siswono Yudohusodo (Cawapres yang diusung oleh PAN), dan Agum Gumelar (Cawapres yang diusung oleh PPP), berasal dari kalangan nasionalis.

Kesatu, sebagian umat Islam (baik dari kalangan santri maupun nasionalis) dipastikan melakukan kegiatan sebagai pelaku pawai politik, penyumbang, berhubungan dengan pemimpin politik. Mereka dianggap telah melakukan kegiatan politik yang tergolong transisi.

Kedua, sebagian umat Islam dipastikan turut serta dalam menempulkan gambar partai atau calon pemimpin, berusaha mempengaruhi orang lain dalam menentukan pilihan, dan memberikan suara pada pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden langsung.

Ketiga, sebagian umat Islam dipastikan telah memilih untuk tidak ikut memilih calon pemimpin yang sedang berkompetisi untuk menjadi pemimpin nasional. Mereka adalah kelompok kritis yang melakukan golput karena berbagai alasan dan jumlah mereka cukup signifikan. Sebagian dari mereka tidak menggunakan hak pilih karena alasan ideologis; dan mungkin yang lainnya karena kekecewaan (karena tokoh yang didukungnya tidak masuk bursa calon pemimpin nasional).

Dalam pemilu legislatif pertama, *nonvote* (atau golput) dilakukan oleh

kelompok Islam tertentu karena tidak percaya kepada partai yang ada (termasuk partai yang berasaskan Islam) dalam upaya mewujudkan syariat Islam di Indonesia secara sungguh-sungguh. Menurut mereka, partai-partai Islam yang ada minus cita-cita penegakan syariat Islam secara *kâffat*.

Dalam pemilihan presiden tahap pertama, tindakan golput disuarakan dan juga sangat mungkin dilakukan oleh kelompok umat Islam (dan tentu tidak hanya umat Islam) yang simpati kepada Abdurrahman Wahid (mantan presiden RI) yang tidak lolos dalam test kesehatan.

Dalam pemilihan presiden tahap kedua, tindakan golput sangat mungkin dilakukan oleh kelompok umat Islam yang simpati kepada Amin Rais (mantan ketua MPR RI) yang tidak lolos pada putaran kedua karena mendapatkan suara yang tidak signifikan dalam pemilihan presiden putaran pertama.

Memperhatikan pihak yang kalah dan yang menang pada pemilihan presiden putaran pertama, pihak yang menang adalah Mega-Hasyim dan Susilo-Kala, sedangkan pihak yang kalah adalah Wiranto-Wahid, Amin-Siswono, dan Hamzah-Agum. Dengan memperhatikan para gladiator yang mencalonkan diri sebagai presiden, pihak santri yang kalah adalah Amin Rais dan Hamzah Haz, sedangkan nasionalis yang kalah hanyalah Wiranto (Geertz, 1960:121). Dari segi calon presiden, pemilihan presiden putaran pertama menunjukkan bahwa umat Islam pada umumnya tidak berminat (mungkin juga tidak atau belum percaya untuk) memilih calon presiden dari kalangan santri. Gladiator yang maju

pada putaran kedua adalah Mega-Hasyim dan Susilo-Kala (mereka lebih tampak sebagai muslim nasionalis). Dengan demikian, pemilihan presiden tahap pertama pada dasarnya memperlihatkan bahwa muslim-santri telah dikalahkan oleh muslim-nasionalis.

Kekalahan Hamzah-Agum di wilayah Jawa Barat menunjukkan bahwa teori yang menyatakan bahwa aspek demografis (kedaerahan) berhubungan secara signifikan dengan perilaku memilih adalah keliru; karena Agum Gumelar (cawapres dari kalangan etnis Sunda satu-satunya) tidak memiliki dukungan yang signifikan di Jawa Barat. Di samping itu, teori yang menyatakan bahwa predisposisi sosial ekonomi dan keluarga memilih (termasuk agama) mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih, perlu dipertanyakan. Mayoritas penduduk Jawa Barat beragama Islam (dan bahkan santri), tetapi pihak gladiator yang mendapat dukungan luas adalah muslim-nasionalis. Oleh karena itu, dalam konteks pemilihan presiden Indonesia di lingkungan provinsi Jawa Barat, menunjukkan dua hal, *pertama* ikatan primordial kedaerahan (etnis) masyarakat Sunda sudah sangat longgar; dan *kedua* ikatan primordial keagamaan (santri) masyarakat Sunda juga rendah. Akan tetapi, pernyataan ini memerlukan pembuktian lebih lanjut, sebab tidak ada data yang pasti yang membuktikan bahwa muslim-santri di Jawa Barat lebih banyak dibanding dengan muslim-nasionalis. Apabila bukti menunjukkan bahwa muslim-nasionalis di Jawa Barat mayoritas, berarti teori Pomper benar adanya.

Belajar dari pemilihan presiden putaran kedua, pihak yang mewakili santri hanyalah satu orang (Hasyim Muzadi, ketua umum PBNU nonaktif ketika itu). Oleh karena itu, sebagian santri kalangan NU mendukung pasangan Mega-Hasyim dengan segenap daya dan dana. Sejumlah pesantren di Jawa Barat (seperti Pesantren Cipasung Tasikmalaya dan Pesantren al-Masthuriyah Sukabumi) menyatakan dukungan secara terbuka kepada pasangan Mega-Hasyim. Dukungan secara tersembunyi dilakukan oleh sekelompok umat Islam yang mengadakan pertemuan di salah satu pesantren di Tasikmalaya dan Muhammadiyah Jawa Barat. Akan tetapi, pasangan Mega-Hasyim tidak memperoleh dukungan mayoritas masyarakat. Kenyataan yang ada yang menjadi pemimpin pertama pilihan rakyat di Indonesia adalah Susilo-Kala. Pilihan presiden putaran kedua membuktikan bahwa kekalahan santri dalam kompetisi politik nasional semakin sempurna. Dalam pemilihan presiden putaran pertama, muslim modernis dan tradisional kalah dalam berkompetisi; dan dalam pemilihan presiden putaran kedua, muslim tradisional juga kalah dalam berkompetisi.

4. Partai Politik Islam dan Nasionalis

Kekalahan pihak santri atas pihak nasionalis (pemilu 2004) mengulang kekalahan kalangan Islam atas nasionalis dalam kancah politik awal kemerdekaan Indonesia; peristiwa yang senantiasa diingat oleh kalangan Islam hingga sekarang adalah Piagam Jakarta yang menghilangkan kalimat “dengan

keajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” (Abdullah, 1991:19). Kalimat ini bukan hanya ditakuti oleh nonmuslim, tetapi juga oleh muslim bahkan sebagian intelektualnya. Jalaluddin Rakhmat misalnya menolak gagasan pelaksanaan syariat Islam karena menolak dominasi kekuasaan fuqaha dan pensucian pemikiran ulama.⁶

Pemilihan presiden putaran pertama menunjukkan bahwa para politisi yang bernaung dalam partai-partai yang berasaskan Islam mulai goyah seiring dengan perubahan cara pandang mereka terhadap doktrin-doktrin politik keagamaan dan kecerdasan untuk menggapai kekuasaan pada level tertentu. Inkonsistensi cara pandang terhadap doktrin politik-keagamaan dengan tindakan politik yang dilakukan oleh para politisinya akan menjadi “blunder” bagi partai-partai yang bersangkutan.

Sekedar contoh, ikhtilaf (perbedaan pendapat) dikalangan ulama tentang keabsahan presiden perempuan telah mengalami proses panjang. Di Indonesia, Bahtsul Masa'il NU (BM-NU) terlihat sebagai lembaga yang paling progresif karena keputusannya yang “radikal.” Pada awalnya (25 Oktober 1961), BM-NU mengharamkan perempuan menjadi kepala desa, sedangkan pada tahun 1987, BM-NU tidak lagi menjadikan perempuan sebagai syarat pemimpin (presiden) (Mubarok, 2003:114-115). Pada pemilu presiden putaran pertama, isu ini muncul kembali. Pengurus NU Wilayah Jawa Timur yang dimotori oleh KH. Abdullah Faqih (dari Langitan) memfatwakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi

presiden. Fatwa ini kemudian disetujui oleh Hamzah Haz (Wapres). Akan tetapi, ketika kalah pada pemilihan presiden putaran pertama, PPP yang juga dipimpin oleh Hamzah Haz termasuk kelompok yang mendukung pembentukan Koalisi Kebangsaan yang dimotori oleh partai Golkar yang secara terbuka mendukung Mega-Hasyim pada pemilihan presiden putaran kedua. Bagaimanapun antara sikap dengan tindakan politik yang dilakukan oleh pimpinan PPP dapat dikatakan inkonsistensi (atau perubahannya terlalu cepat sehingga sulit dipahami).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dimotori oleh Hidayat Nur Wahid juga melakukan tindakan politik yang kelihatannya inkonsistensi dengan pernyataannya. Pada pemilihan presiden putaran pertama, diberbagai media massa diberitakan bahwa PKS tidak akan mendukung calon presiden dari kalangan militer. Pada putaran pertama, meskipun kelihatannya terlambat, PKS mendukung pasangan Amin-Siswono. Akan tetapi, capres-cawapres dukungan sejumlah partai kecil ini tidak lolos pada putaran kedua. Pada pemilihan presiden putaran kedua secara terbuka dengan argumentasi adanya kesamaan visi dan kontrak politik, PKS mendukung pasangan Susilo-Kala, Susilo Bambang Yudoyono yang notabene seorang jenderal-militer. Tindakan ini memberikan kesan bahwa PKS bertindak oportunistis (demi kepentingan praktis-sesaat), dan melanggar janjinya sendiri. Begitu juga Partai Bulan Bintang (PBB) yang dimotori oleh Yusril Ihza Mahendra, sejak pemilihan presiden putaran pertama, PBB seperti sudah lupa dengan janji-janjinya pada awal

pendirian partai, yaitu menegakkan syariat Islam secara kaffah. PBB menyatakan dukungan pada pasangan Susilo-Kala yang berasal dari kalangan nasionalis.

Inkonsistensi antara pandangan politik-keagamaan PPP, PKS, dan PBB, dengan tindakan politik yang dilakukan, memberikan kesan bahwa dari segi cita-cita penegakkan syariat Islam secara kaffah (semangat Piagam Jakarta), para politisi di tiga partai tersebut sulit dipercaya, pandangannya mudah berubah karena kepentingan sesaat, dan mungkin akan ditinggalkan oleh pemilihnya pada pemilihan umum lima tahun ke depan (2009).

Sebagai telah disinggung bahwa kekalahan pasangan Mega-Hasyim pada pemilihan presiden putaran kedua, merupakan kekalahan pihak muslim santri atas muslim nasionalis. Pasangan ini dalam pemilihan presiden putaran kedua didukung oleh sejumlah kyai di pesantren-pesantren (tradisional), Muhammadiyah PWM Jawa Barat (modernis), dan kalangan intelektual muslim yang mengadakan pertemuan di salah satu pesantren di Tasikmalaya. Akan tetapi, pasangan Mega-Hasyim kalah. Kekalahan ini dapat diartikan bahwa muslim santri (baik tradisional, modernis, maupun intelektual) sudah tidak lagi ditaati oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, dapat diduga bahwa kekalahan Mega-Hasyim pada pemilihan presiden putaran kedua merupakan bukti masyarakat semakin otonom (tidak melakukan tindakan atas dasar tekanan kelompok keagamaan). Kesan yang muncul kemudian adalah bahwa institusi pesantren (termasuk kyai) dan pimpinan

ormas-ormas Islam sudah tidak ditaati, dan tidak dipercaya oleh masyarakatnya.

5. Penutup

Peranan umat Islam dalam pemilihan presiden tahun 2004 dapat dikelompokkan menjadi dua: (1) kelompok muslim yang menggunakan hak pilihnya dengan bertindak sebagai gladitor, kegiatan transisi, atau kegiatan petaruh; dan (2) kelompok muslim yang melakukan tindakan apatis (mereka memilih untuk tidak memilih) dan lebih dikenal sebagai kelompok golput.

Perubahan yang terjadi di tubuh partai-partai Islam begitu cepat sehingga kurang tersosialisasikan kepada publik. Kesan yang muncul kemudian adalah bahwa politisi muslim-santri cenderung inkonsisten antara pernyataan dengan tindakan politik yang mereka lakukan. Inkonsistensi ini bisa dijadikan alasan oleh para pendukungnya untuk tidak memilih lagi partai-partai tersebut pada pemilu yang akan datang, yaitu pemilu 2009.

Kegiatan politik dengan menampilkan kesalehan secara individual dan sosial seperti yang dilakukan oleh PKS memberikan secercah harapan akan masa depan partai-partai yang berasaskan Islam. Oleh karena itu, virus pola pengkaderan dan pembinaan mental kelompoknya harus segera ditularkan kepada ormas dan partai Islam lain agar politisinya terhindar dari KKN dan dapat membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Perlu diingat oleh segenap umat Islam, bahwa partai politik bukanlah satu-satunya alat perjuangan bagi umat Islam dalam membela hak-hak mereka.

Seperti hak hidup dengan layak, mendapatkan pendidikan yang layak, pekerjaan yang memadai, dan hak-hak lainnya. Yang lebih utama lagi, bagaimana umat Islam terbebas dari dua penyakit utama yang kini membelenggu mereka, yaitu kemiskinan dan kebodohan. Paling tidak partai-partai yang mengusung dua isu ini sebagai tujuan perjuangan mereka, besar kemungkinan akan menanggung kemengan di ajang pesta demokrasi nanti (pemilu 2009).

6. Keterangan

¹*Monarchia* berasal dari *monos* dan *arche*. *Monos* berarti sendiri; dan *arche* berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, monarki secara bahasa berarti pemerintahan satu orang. Lihat J. H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), cet. ke-2, h. 46.

²Aristokrasi berasal dari *aristos* dan *kratos*. *Aristos* berarti paling baik; dan *kratos* berarti kekuasaan atau pemerintahan. Oleh karena itu, arti aristokrasi secara bahasa adalah pemerintahan yang dikendalikan oleh beberapa orang yang paling baik atau paling arif. J. H. Rapar, *Filsafat Politik*, h. 46.

³Secara bahasa, politeia berarti konstitusi.

⁴J. H. Rapar, *Filsafat Politik*, h. 44-46.

⁵Oligarki berasal dari *oligon* (sedikit) dan *arche* (kekuasaan).

⁶Pendapat tersebut disampaikan secara lisan dalam acara Simposium Nasional "Format Baru Gerakan Keagamaan" yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Jakarta, 6 Agustus 1998 di PPIM Jakarta. Lihat Jaih Mubarak, "Format Baru Gerakan Keagamaan di Indonesia," makalah dipresentasikan dalam diskusi reguler PPIP IAIN SGD Bandung 10 Agustus 1998, h. 2, t.d.

7. Pustaka

- A. Tafsir. 1985. "Negara Sekuler yang Mementingkan Agama: Sebuah Pengantar," *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*. Ali Abd al-Raziq. Bandung: Pustaka.
- Abdullah, Abdul Gani (penghimpun). 1991. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Intermasa.
- Al-Raziq, Ali `Abd. *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*. Mesir: al-Hay'at al-Mishriyyat al-'Ammat li al-Kitab, t.th).
- 1994. "Kekhilafahan dan Dasar-Dasar Kekuasaan," *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*. John J. Donohue dan John L. Esposito (ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aristotle. 2000. *Politics*. terj. Benjamin Jowet, direproduksi oleh Cik Hasan Bisri. Bandung: Lembaga Penelitian IAIN SGD.
- Campbell, Tomp Campbell. 1994. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Geertz, Clifford. 1960. *The Religion of Java*. Canada: Collier-Macmillan.
- Khaeruman, Badri., dkk. 2004. *Islam dan Demokrasi: Mengungkap Fenomena Golput sebagai Alternatif Partisipasi Politik Umat*. Jakarta: Nimas Multima.
- Mubarok, Jaih Mubarok. 2001. "Camat Wanita di Tasikmalaya Mengapa Diprotes," *Pikiran Rakyat*, 7 Oktober 2001.
- "Dinamika Pemikiran Hukum Islam di Indonesia," *Unisia: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Nomor 48/XXVI/II/2003.
- 2001. "Dukungan NU buat Mega," *Republika*, 13 Juli 2001.
- 1998. "Format Baru Gerakan Keagamaan di Indonesia," makalah dipresentasikan dalam diskusi reguler PPIP IAIN SGD Bandung 10 Agustus 1998.
- Rais, M. Amin. 1998. "Masalah-masalah yang Dihadapi Bangsa Indonesia," *Milenium: Jurnal Agama dan Tamaddun*, Nomor 1 Tahun 1, Januari-April 1998.
- Rapar, J. H. 1993. *Filsafat Politik Aristoteles*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ritzer, George. 2002. *Sociological Theory*. New York: MC Graw-Hill.
- Sodik, Abror. "Perilaku Memilih Warga NU pada Pemilu 1999 di Kampung Mlangi Desa Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman," dalam *Jurnal Penelitian Agama Islam*, Vol. XII, No. 2, Mei-Agustus 2003.
- Zuhri, Muh. 2002. "Sejarah Politik Islam," *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Edisi ke-3, Januari 2002.